

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika adaptasi dan komunikasi antarbudaya yang dialami oleh kelompok imigran. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Emelli (2018) dalam tesis berjudul *Young Afghan Refugee Men in Indonesia: Hope and Agency in Uncertainty* menyoroti pengalaman subjektif pemuda pengungsi Afghanistan yang tinggal di Indonesia, khususnya dalam membangun harapan (*hope*) dan mempertahankan agensi diri di tengah situasi hidup yang penuh ketidakpastian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis narasi digital (termasuk media sosial), penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun para pengungsi menghadapi keterbatasan hak, hambatan mobilitas, serta ketidakjelasan masa depan, mereka tetap mengembangkan strategi makna (*sense-making*) untuk menjaga identitas dan daya juang. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman pengungsi tidak hanya dipenuhi penderitaan, tetapi juga mengandung kapasitas reflektif dan resistensi simbolik. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menyoroti pengalaman hidup pengungsi Afghanistan di Indonesia melalui pendekatan kualitatif, namun berbeda fokus karena Emelli lebih menekankan aspek harapan dan narasi personal, sedangkan penelitian ini berfokus pada gejag budaya serta strategi adaptasi budaya dalam konteks komunikasi antarbudaya.

Sementara itu, penelitian oleh Chenia Ilma Kirana, Ani Widjani Soetjipto, dan Mia Siscawati (2023) yang berjudul *Complexity of Violences Towards Afghanistan Refugee Women in DKI Jakarta* mengkaji pengalaman perempuan pengungsi Afghanistan di Indonesia dengan menitikberatkan pada berbagai bentuk kekerasan yang mereka alami, baik kekerasan langsung, struktural, maupun kultural. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap lima informan

perempuan, penelitian tersebut mengungkap bahwa posisi perempuan pengungsi berada dalam kerentanan berlapis akibat kombinasi faktor gender, status hukum, keterbatasan ekonomi, dan marginalisasi sosial. Dengan menggunakan kerangka teori kekerasan Johan Galtung dan perspektif gender, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengalaman hidup pengungsi tidak hanya dipengaruhi oleh trauma masa lalu, tetapi juga oleh struktur sosial di negara penerima. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal konteks subjek (pengungsi Afghanistan di Indonesia) dan pendekatan kualitatif, tetapi berbeda dalam fokus analisis karena penelitian ini menekankan aspek adaptasi budaya dan komunikasi antarbudaya, bukan secara spesifik isu kekerasan berbasis gender.

Prasasti et al. (2022), dalam artikelnya "Migrasi Rohingya: Tantangan Integrasi Sosial dan Ekonomi di Negara Penerima", menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memetakan berbagai hambatan yang dihadapi pengungsi Rohingya di Indonesia. Penelitian tersebut berfokus pada aspek struktural seperti akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta diskriminasi sosial dan ketidakpastian status hukum. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya intervensi kebijakan dalam memfasilitasi integrasi pengungsi. Namun, kelemahan penelitian ini adalah tidak menelaah secara mendalam proses komunikasi antarbudaya dan strategi adaptasi budaya dalam konteks komunitas lokal tertentu seperti Gading Serpong.

Siregar dan Lubis (2020), dalam penelitian berjudul "Komunikasi Antarbudaya Etnis Rohingya dalam Upaya Eksistensi Diri di Pengungsian Kota Medan", mengaplikasikan teori akomodasi komunikasi untuk menganalisis bagaimana pengungsi Rohingya menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Melalui metode kualitatif berupa wawancara dan observasi, penelitian tersebut menemukan bahwa strategi komunikasi, seperti penyesuaian bahasa dan norma interaksi, menjadi mekanisme utama dalam mempertahankan eksistensi diri dan mengurangi konflik sosial. Meskipun bermanfaat dalam mengilustrasikan proses adaptasi, penelitian tersebut terbatas pada konteks kamp pengungsi dan tidak membahas interaksi imigran, khususnya imigran dari

Afghanistan dengan komunitas lokal mapan seperti di wilayah urban.

Rangsikul (2018), dalam artikelnya "Identitas Etnis dan Proses Akulturasi Rohingya di Bangkok, Thailand", menggunakan metode wawancara mendalam untuk menelusuri strategi akulturasi yang dilakukan oleh Rohingya di negara penerima non-Muslim. Penelitian tersebut berfokus pada konstruksi identitas dan perubahan sosial dalam konteks akulturasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat diskriminasi yang cukup tinggi, hubungan sosial dengan masyarakat lokal dapat terbangun perlahan melalui jaringan sosial yang semakin kuat. Penelitian tersebut memberikan perspektif lintas negara yang relevan, namun kurang relevan secara geografis dan tidak mengkaji konteks budaya lokal di Indonesia.

Kemudian, Anwar dan Harryanto (2021) dalam penelitiannya "Komunikasi Interpersonal sebagai Cara Akulturasi Budaya Imigran Afrika dengan Masyarakat Lokal di Shelter House Puspa Agro Sidoarjo", menggunakan teori komunikasi antarbudaya dan konsep akulturasi dalam menganalisis proses integrasi imigran asal Afrika. Dengan metode observasi dan wawancara mendalam, mereka menemukan bahwa keterlibatan dalam kegiatan komunal seperti olahraga serta belanja bersama memfasilitasi terciptanya citra diri positif dan kedekatan sosial. Penelitian tersebut memberikan gambaran umum tentang pentingnya komunikasi interpersonal dalam proses adaptasi budaya, namun tidak membahas pengalaman imigran dari Afghanistan atau Iran secara langsung atau wilayah Gading Serpong sebagai lokasi penelitian.

Dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan struktural dan latar historis imigran serta dinamika komunikasi di konteks pengungsian, sebagian besar penelitian memiliki keterbatasan signifikan. Secara tujuan, penelitian-penelitian sebelumnya belum menyoroti secara spesifik strategi adaptasi budaya dan komunikasi antarbudaya yang dilakukan oleh kelompok migran paksa. Secara metodologi, temuan cenderung bersifat umum serta mengabaikan perbedaan antara migran sukarela dan paksa,

atau hanya terbatas pada konteks kamp, *shelter*, atau lingkungan yang tidak representatif sebagai komunitas urban yang mapan. Keunikan wilayah Gading Serpong sebagai area perkotaan modern, multikultural, dan relatif makmur, di mana imigran Afghanistan sebagai kelompok pengungsi paksa hidup berdampingan dengan masyarakat lokal yang mapan belum pernah dikaji sebelumnya.

Oleh sebab itu, *gap* penelitian ini terletak pada keterbatasan penelitian yang mengkombinasikan tiga elemen penting, yaitu: (1) subjek spesifik, yaitu migran dari Afghanistan yang merupakan migran paksa; (2) Konteks unik, yaitu lingkungan Gading Serpong sebagai komunitas urban mapan, bukan kamp pengungsi; serta (3) Fokus teoritis dan objektif, yaitu penelaahan mendalam terhadap strategi adaptasi budaya dan dinamika komunikasi antarbudaya. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk memetakan secara holistik strategi adaptasi budaya dan negosiasi identitas imigran Afghanistan di lingkungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan geografis dan subjek, tetapi juga memperkaya pemahaman teoritis mengenai proses akulterasi dan komunikasi antarbudaya dalam konteks perkotaan multikultural di Indonesia, sehingga menjadikannya relevan bagi pengembangan kebijakan integrasi sosial yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan.



Tabel 2.1 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Item	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3	Jurnal 4	Jurnal 5	Jurnal 6
1.	Judul Artikel Ilmiah	Young Afghan Refugee Men in Indonesia: Hope and Agency in Uncertainty	Complexity of Violences Towards Afghanistan Refugee Women in DKI Jakarta	MIGRASI ROHINGYA: TANTANGAN INTEGRASI SOSIAL DAN EKONOMI DI NEGARA PENERIMA	Komunikasi Antarbudaya Etnis Rohingya dalam Upaya Eksistensi Diri Di Pengungsian Kota Medan	IDENTITAS ETNIS DAN PROSES AKULTURASI ROHINGYA DI BANGKOK, THAILAND	Komunikasi Interpersonal sebagai cara Akulturasi Budaya Imigran Afrika dengan Masyarakat Lokal di Shelter House Puspa Agro Sidoarjo
2.	Nama Lengkap Peneliti, Tahun Terbit,	Putri Emelli; 2018; Master of Arts in Development Studies, The Hague,	Chenia Ilma Kirana, Ani Widyani Soetjipto, Mia Siscawati; 2023; Proceedings of	Cinta Prasasti, Suci Wheli Melvia, Muhammad Irwan Sahruddin	Nora Maya Siregar, Amru Lubis, 2020	Rungthum Rangsikul, 2018	Muhammad Nurul Anwar, Didik Harryanto,2021

dan	Netherlands	Fourth Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities (Atlantis Press)	Nasution, Ricu Sidiq, Lister Eva Simangunsong, Muhammad Ihsan Syahaf Nasution,2022			
Penerbit	(Tesis)					
3. Fokus Penelitian	Menelaah bagaimana laki-laki muda pengungsi Afghanistan di Indonesia mengkonstruksi harapan dan agency mereka dalam kondisi ketidakpastian panjang, termasuk bagaimana narasi sosial media mencerminkan strategi bertahan hidup	Menjelaskan pengalaman dan bentuk-bentuk kekerasan kompleks yang dialami perempuan pengungsi Afghanistan di DKI Jakarta, seperti aspek akses kebutuhan dasar, marginalisasi, serta kekerasan fisik, struktural, dan budaya.	Tantangan integrasi sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh migran Rohingya di negara penerima, dengan fokus khusus pada Indonesia	Proses komunikasi antarbudaya dan bentuk adaptasi etnis Rohingya dalam upaya eksistensi diri di pengungsian Kota Medan	Proses akulturasi identitas etnis Rohingya dan proses akulturasi mereka dalam pengungsian di Bangkok, Thailand	Konstruksi budaya imigran Afrika dari Sudan dan Somalia dengan masyarakat lokal di Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo

mereka.

4. Teori	Kerangka teoritis terkait <i>hope, agency, dan sense-making</i> dalam kajian pengungsi, pendekatan visual atau <i>digital storytelling</i> sebagai alat analisis naratif terhadap media sosial dan pengalaman subjektif.	Teori bentuk-bentuk kekerasan Johan Galtung (<i>direct, cultural, structural violence</i>) dikombinasikan dengan perspektif gender untuk menganalisis pengalaman perempuan.	Tidak disebutkan	Teori akomodasi komunikasi dan adaptasi	Tidak disebutkan	Komunikasi antarbudaya dan akulterasi
----------	--	---	------------------	---	------------------	---------------------------------------

	Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, <i>focus group discussion</i> , observasi, serta analisis visual atau etnografi digital terhadap narasi media sosial dari sebelas responden muda Afghanistan di Indonesia.	Pendekatan kualitatif studi kasus; data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap lima subjek perempuan pengungsi Afghanistan; dianalisis dengan perspektif gender.	Pendekatan kualitatif deskriptif	Kualitatif	Wawancara mendalam	Wawancara mendalam dan observasi
6. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan	Sama-sama berfokus pada pengalaman pengungsi Afghanistan di Indonesia; menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk memahami	Sama-sama meneliti kehidupan pengungsi Afghanistan di Indonesia secara kualitatif; menunjukkan tantangan sosial dan struktur yang mempengaruhi kesejahteraan pengungsi; sama-	Membahas tantangan integrasi sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh migran di Indonesia.	Membahas proses adaptasi budaya dan komunikasi antarbudaya di Indonesia.	Membahas proses akulturasi dan konstruksi identitas etnis asli di negara penerima.	Membahas proses akulturasi budaya imigran dan interaksi dengan masyarakat lokal di Indonesia.

	dinamika subjektif adaptasi sosial atau pengalaman hidup; menekankan konteks kehidupan pengungsi di negara transit.	sama mengandalkan wawancara mendalam.			
7. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan	Fokus utamanya pada harapan, agency, dan narasi pengalaman individu muda, bukan eksplorasi adaptasi budaya secara lintas konteks sosial; subjek penelitian laki-laki muda.	Fokus pada kekerasan dan marginalisasi perempuan, mengadopsi teori adaptasi budaya atau khusus dan perspektif gender yang berbeda dengan fokus adaptasi	Tidak secara spesifik membahas strategi adaptasi budaya atau lokasi	Fokus pada pengungsian di Kota Medan, bukan di Gading Serpong.	Fokus pada pengungsian di Bangkok, Thailand, Indonesia atau Gading Serpong. Rohingya di Sidoarjo, bukan imigran Afrika di imigran Rohingya atau lokasi

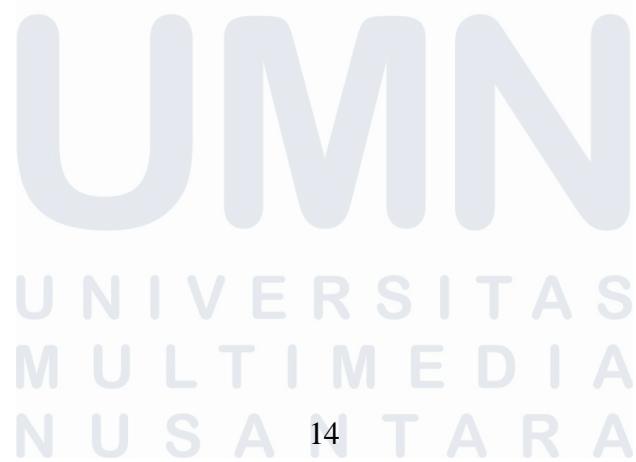
			budaya;				
			subjek				
			perempuan.				
8.	Hasil Penelitian	Meskipun menghadapi ketidakpastian birokrasi dan penolakan akses hak dasar, para pemuda Afghanistan berusaha memberi makna pada hidup mereka melalui narasi tentang harapan masa depan, pengalaman pribadi, dan teknik <i>sense-making</i> yang membantu mereka mempertahankan <i>agency</i> di tengah situasi yang tidak	Pengungsi perempuan Afghanistan menghadapi kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti fisik, budaya, struktural, yang dipengaruhi oleh faktor patriarki, marginalisasi sosial, ketidakmampuan akses layanan dasar, serta struktur kelembagaan di negara penampung; pengalaman tersebut sangat kompleks dan berhubungan dengan identitas agensi di tengah berlapis responden.	Tantangan utama yang dihadapi migran Rohingya meliputi akses terbatas ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan, serta diskriminasi sosial dan stigmatisasi. Status hukum yang tidak jelas, perbedaan budaya dan agama, serta ketidakstabilan politik dan kemanusiaan juga mempengaruhi	Dalam hubungan sosial yang berlangsung pada etnis Rohingya di pengungsian Kota Medan, terjadi proses akomodasi sebagai bentuk penyesuaian sosial dalam interaksi. Proses ini melibatkan komunikasi dan budaya	Strategi akultifikasi yang mencerminkan integrasi. Hubungan dengan orang lain meningkat secara bertahap seiring waktu. Diskriminasi dianggap sebagai masalah yang masalah yang problematik. Hidup dalam lingkungan yang berubah telah dimodifikasi tergantung pada konteks budaya, latar belakang individu, dan	Imigran Afrika berupaya menyesuaikan diri dengan berinteraksi langsung dengan penghuni lokal Rusunawa Puspa Agro dan mencoba berkomunikasi untuk menciptakan citra diri. Mereka berpartisipasi dalam olahraga dan berbelanja di lingkungan baru mereka.

pasti.

proses integrasi
mereka.

karakteristik sosial.

13



14

2.2 Landasan Konsep

2.2.1 Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya sebagaimana dikonseptualisasikan Samovar, et al. (2013) merujuk pada proses pertukaran pesan antara pengirim dan penerima yang berlatar nilai, norma, dan sistem simbol berbeda, sehingga makna tidak pernah “tersalur apa adanya,” melainkan dinegosiasikan melalui lensa kebudayaan. Perspektif tersebut menempatkan kebudayaan sebagai “kode induk” yang menentukan apa yang dikatakan, bagaimana dikatakan, dan bagaimana pesan diinterpretasikan;. Dengan demikian, setiap tindakan komunikasi merupakan tindakan kultural. Samovar et al. (2013) menekankan bahwa komunikasi antarbudaya tidak terbatas pada penggunaan bahasa verbal lintas bangsa, tetapi meliputi seluruh spektrum perilaku simbolik, seperti intonasi suara, diam, ekspresi wajah, kontak mata, gestur, jarak fisik, hingga artefak material yang diatur oleh aturan implisit suatu budaya.

Kerangka teoretis inti yang ditawarkan oleh Samovar et al. (2013) memuat empat komponen utama komunikasi, yaitu pengirim, pesan, saluran, dan penerima. Dalam konteks lintas budaya, setiap komponen sarat variabel budaya yang dapat menjadi sumber distorsi. Pengirim menanamkan maksud ke dalam pesan melalui “*filter budaya*” berupa nilai, sikap, dan persepsi yang dibentuk sejak kecil. Penerima dengan *filter* berbeda mendekode pesan tersebut, sehingga potensi ketidakcocokan makna, atau apa yang disebut Samovar et al. (2013) sebagai *misinterpretation* meningkat tajam. Oleh sebab itu, kompetensi komunikasi antarbudaya mensyaratkan kesadaran metakognitif atas *filter* pribadi sekaligus empati terhadap *filter* orang lain.

Samovar et al. (2013) menguraikan tiga dimensi pokok yang menstrukturkan komunikasi antarbudaya, yaitu sebagai berikut.

1. Dimensi kognitif, yaitu pengetahuan faktual tentang bahasa, sejarah, dan kebiasaan budaya lawan bicara.

2. Dimensi afektif, yaitu sikap terbuka, toleransi terhadap ambiguitas, dan motivasi untuk menjalin hubungan.
3. Dimensi perilaku, yaitu keterampilan verbal-nonverbal menyesuaikan pesan dengan konteks budaya.

Lebih lanjut, Samovar et al. (2013) menyoroti konsep *context*, yaitu konteks tinggi (*high context*) dan konteks rendah (*low context*) yang dipopulerkan Edward Hall sebagai variabel penting untuk memahami perbedaan gaya komunikasi. Budaya *high-context* (seperti Jepang, Tiongkok, sebagian besar masyarakat Asia Tenggara) mengandalkan petunjuk implisit, relasi sosial, dan situasi nonverbal. Makna sering “dibaca *between line*.” Sebaliknya, budaya *low-context* (Amerika Serikat, Jerman, Skandinavia) menekankan pesan eksplisit, logika linear, dan kejelasan verbal. Ketika individu dari dua kutub konteks tersebut berinteraksi, kegagalan memahami cara “mengkode” dan “membaca” makna menimbulkan kesalahpahaman. Samovar et al. (2013) memaparkan contoh klasik, yaitu sikap diam dalam budaya *high-context* dapat berarti rasa hormat atau persetujuan, sedangkan dalam budaya *low-context* sering ditafsir sebagai ketidaktahuan atau penolakan.

Komunikasi nonverbal mendapat perhatian khusus karena komunikasi verbal “berbicara lebih nyaring” ketimbang kata-kata. Samovar et al. (2013) mengklasifikasikan sistem nonverbal ke dalam kategori kinetik (gerak tubuh), *paralanguage* (nada, kecepatan, volume suara), *proxemics* (jarak), *chronemics* (orientasi waktu), *oculesics* (kontak mata), *haptics* (sentuhan), dan *artefactual* (pakaian, simbol). Variasi antarbudaya begitu tajam, seperti menyentuh kepala dianggap biasa di Barat, namun sakral dan terlarang di berbagai masyarakat Asia. Selain itu, menatap mata langsung menunjukkan ketulusan bagi sebagian budaya, tetapi dapat ditafsir sebagai agresi di budaya lain. Kesadaran terhadap “gramatika” nonverbal tersebut merupakan kunci untuk menghindari konflik simbolik.

Dalam kerangka hubungan antar kelompok, Samovar et al. (2013) menekankan peran stereotip, prasangka, dan etnosentrisme sebagai hambatan

laten komunikasi. Stereotip, yaitu generalisasi kaku tentang anggota kelompok, membentuk “skrip” interpretatif yang membuat individu mengabaikan pesan inkonsisten dengan ekspektasi mereka. Prasangka menambahkan muatan evaluasi negatif, sedangkan etnosentrisme menjadikan budaya sendiri sebagai tolok ukur universal. Ketiganya mempersempit cakupan persepsi, mengeraskan sikap, dan memicu *defensive communication*. Oleh sebab itu, strategi komunikasi efektif harus mencakup upaya dekonstruksi citra stereotipikal melalui pertukaran informasi langsung yang positif dan setara.

Samovar et al. (2013) juga mengajukan konsep *competent intercultural communicator*, yaitu sosok komunikator yang menampilkan lima kualitas, terdiri dari motivasi (*desire to engage*), pengetahuan budaya, keterampilan komunikatif, kesadaran diri budaya, dan fleksibilitas. Individu kompeten tidak sekadar mengetahui fakta budaya, tetapi mampu menyesuaikan gaya bicara, memonitor umpan balik, dan merevisi pesan secara *real-time*. Kompetensi tersebut bersifat situasional, di mana efektivitas dalam satu konteks tidak menjamin keberhasilan di konteks lain, sehingga menuntut proses belajar secara berkelanjutan.

Aspek etika menjadi bagian lain yang penting dalam bahasan Samovar et al. (2013). Mereka menegaskan bahwa komunikasi antarbudaya tidak dapat dilepaskan dari prinsip saling menghargai martabat manusia (*human dignity*) dan tanggung jawab bersama. Norma etika bersifat relatif, namun prinsip keadilan, kejujuran, dan empati dianggap sebagai nilai lintas budaya yang dapat dijadikan landasan universal. Praktik komunikasi yang etis menghindari manipulasi, penghinaan simbolik, dan dominasi. Sebaliknya, komunikasi etis mendorong dialog, kesetaraan suara, serta pencarian makna bersama.

Kesadaran akan proses komunikasi antarbudaya yang berlapis tersebut memiliki implikasi praktis luas, mulai dari pendidikan internasional, diplomasi, bisnis global, hingga integrasi pengungsi. Samovar et al. (2013) menegaskan bahwa kegagalan komunikasi kerap lebih berbahaya daripada konflik politik itu sendiri, karena kesalahan tafsir simbolik dapat menyulut permusuhan, bahkan

ketika tujuan kedua pihak sinergis. Dengan demikian, investasi pada pelatihan kompetensi antarbudaya bukanlah opsi tambahan, melainkan prasyarat untuk membangun kerja sama lintas bangsa yang berkelanjutan.

Dalam konteks migrasi, kerangka konsep dari Samovar et al. (2013) membantu memetakan titik-titik rawan, yaitu perbedaan *high context* dan *low context* ketidaksadaran akan norma nonverbal, stereotip timbal balik, serta ketidakseimbangan kekuasaan yang memelihara etnosentrisme. Pendekatan praktis yang direkomendasikan oleh mereka mencakup program orientasi budaya dua arah, forum dialog setara, dan penciptaan ruang interaksi informal yang memungkinkan pertukaran simbol tanpa tekanan formalitas. Pada akhirnya, komunikasi antarbudaya yang efektif menuntut kesediaan untuk “mendengarkan sambil menangguhkan penilaian,” suatu sikap yang menurut Samovar et al. (2013) merupakan inti dari kemanusiaan bersama.

2.2.2 Adaptasi Budaya

Adaptasi budaya merupakan proses kompleks yang dialami individu atau kelompok ketika mereka berpindah ke lingkungan budaya yang berbeda dari budaya asalnya. Samovar et al. (2013) menjelaskan bahwa adaptasi budaya bukanlah fenomena yang bersifat instan atau linear, melainkan merupakan proses dinamis yang berlangsung terus-menerus serta melibatkan penyesuaian kognitif, afektif, dan perilaku terhadap lingkungan budaya baru. Dalam konteks migrasi, proses tersebut menjadi sangat signifikan karena menyangkut upaya individu untuk memahami, menerima, dan menjalani kehidupan dalam sistem nilai, norma, bahasa, serta praktik sosial yang berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya.

Menurut Samovar et al. (2013), adaptasi budaya dapat dipahami sebagai bagian dari komunikasi antarbudaya, yakni bagaimana individu menyesuaikan cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar budaya yang berbeda. Dalam hal ini, adaptasi tidak hanya terjadi pada tingkat permukaan, seperti bahasa atau kebiasaan sehari-hari, tetapi juga mencakup penyesuaian

dalam cara berpikir, merespons emosi, serta cara membangun dan mempertahankan hubungan sosial. Oleh sebab itu, adaptasi budaya berhubungan erat dengan keberhasilan komunikasi antarbudaya yang efektif dan sensitif terhadap perbedaan budaya.

Samovar et al. (2013) menekankan bahwa adaptasi budaya terjadi dalam berbagai tahapan yang dapat dijelaskan melalui *U-curve theory*, yang menggambarkan pengalaman emosional individu ketika menghadapi budaya baru. Tahap pertama adalah *honeymoon stage*, yaitu periode awal ketika individu merasa antusias dan penasaran terhadap hal-hal baru yang mereka temui. Pada tahap tersebut, pengalaman baru dianggap menyenangkan dan menarik. Namun, tahap tersebut umumnya disusul oleh *culture shock*, yaitu perasaan frustrasi, cemas, serta kebingungan ketika individu mulai menyadari perbedaan yang signifikan antara budaya asal dan budaya baru. *Culture shock* menjadi titik kritis dalam proses adaptasi karena individu dihadapkan pada realitas bahwa nilai-nilai dan perilaku yang mereka anggap normal ternyata tidak selalu sesuai dengan konteks budaya yang baru (Samovar et al., 2013).

Setelah melewati masa *culture shock*, individu memasuki tahap *adjustment*, di mana mereka mulai belajar cara mengelola perbedaan dan membangun keterampilan untuk menjalani kehidupan dalam budaya baru. Tahap tersebut ditandai dengan peningkatan kemampuan berkomunikasi, penerimaan terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan pembentukan pola interaksi yang lebih stabil. Kemudian, individu dapat mencapai tahap *adaptation* atau *biculturalism*, yaitu kondisi ketika seseorang mampu berfungsi secara efektif dalam dua budaya sekaligus. Mereka tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan budaya baru, tetapi juga mempertahankan identitas budaya asalnya dengan cara yang harmonis (Samovar et al., 2013).

Dalam kerangka adaptasi budaya, Samovar et al. (2013) juga menguraikan tentang *acculturation*, yaitu proses yang terjadi ketika dua kelompok budaya saling berinteraksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan dalam pola budaya masing-masing. *Acculturation* dapat berlangsung

secara sepihak, di mana kelompok minoritas lebih banyak menyesuaikan diri dengan budaya dominan, atau secara timbal balik, di mana kedua belah pihak saling memengaruhi. Dalam konteks imigran atau pengungsi, proses akulterasi seringkali berlangsung tidak seimbang karena mereka berada dalam posisi subordinat. Oleh sebab itu, strategi adaptasi yang digunakan oleh individu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memiliki kekuatan untuk mempertahankan identitas budaya asal sekaligus menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya mayoritas.

Samovar et al. (2013) mengidentifikasi empat strategi akulterasi berdasarkan kerangka John Berry, yaitu *assimilation*, *integration*, *separation*, dan *marginalization*. Strategi *assimilation* terjadi ketika individu sepenuhnya mengadopsi budaya baru dan melepaskan budaya asal. *Integration* mengacu pada kemampuan individu untuk mempertahankan identitas budayanya sambil secara aktif berpartisipasi dalam budaya dominan. *Separation* merupakan strategi di mana individu memilih untuk tetap terikat pada budaya asal dan menghindari interaksi dengan budaya baru. Sementara itu, *marginalization* terjadi ketika individu terputus dari kedua budaya, baik asal maupun baru, sehingga mengalami keterasingan yang mendalam. Dari keempat strategi tersebut, *integration* dianggap paling ideal karena memungkinkan terciptanya harmoni antara identitas diri dan tuntutan lingkungan sosial.

Adaptasi budaya juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal, faktor seperti kepribadian, motivasi, sikap terbuka, dan kemampuan komunikasi sangat menentukan keberhasilan adaptasi. Individu yang memiliki fleksibilitas kognitif dan toleransi terhadap ambiguitas cenderung lebih mudah beradaptasi karena mampu menerima perbedaan tanpa merasa terancam. Sementara itu, faktor eksternal seperti dukungan sosial, sikap masyarakat penerima, serta kebijakan negara terhadap imigran memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses adaptasi (Samovar et al., 2013).

Dalam berbagai kasus, adaptasi budaya juga beriringan dengan konflik identitas. Individu yang berada di antara dua budaya kerap menghadapi dilema mengenai siapa diri mereka sebenarnya. Samovar et al. (2013) menyebut kondisi tersebut sebagai *cultural identity negotiation*, yaitu proses di mana individu menegosiasikan ulang identitasnya dalam situasi interkultural. Dalam proses tersebut, individu berusaha menyeimbangkan antara kesetiaan terhadap nilai-nilai budaya asal dengan kebutuhan untuk diterima dalam budaya baru. Konflik tersebut dapat menjadi sumber stres, namun juga merupakan bagian penting dari pertumbuhan identitas yang lebih kompleks dan inklusif.

Kesadaran akan pentingnya komunikasi antarbudaya yang efektif juga menjadi bagian integral dari proses adaptasi. Samovar et al. (2013) menekankan bahwa keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada kemampuan individu untuk memahami perbedaan budaya dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Perbedaan dalam gaya bicara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta makna simbolik dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, keterampilan komunikasi antarbudaya yang sensitif dan reflektif menjadi kompetensi kunci dalam mendukung adaptasi yang positif.

Secara keseluruhan, adaptasi budaya bukanlah proses yang bebas hambatan, namun merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan kesabaran, empati, dan ketangguhan psikologis. Dalam konteks migrasi, proses tersebut menjadi sangat penting karena menyangkut kapasitas individu untuk bertahan, berkembang, dan membangun kehidupan baru di tengah lingkungan yang berbeda. Dengan memahami teori dan dinamika adaptasi budaya sebagaimana dijelaskan oleh Samovar et al. (2013), Peneliti dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh imigran dan pentingnya dukungan lintas budaya dalam menciptakan masyarakat yang inklusif serta saling menghargai.

2.2.3 Dimensi Budaya Hofstede

Dimensi budaya Hofstede merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Geert Hofstede untuk memahami perbedaan budaya di berbagai negara serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi perilaku individu dalam konteks sosial dan organisasi. Hofstede mengidentifikasi enam dimensi budaya yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan budaya di seluruh dunia. Dimensi-dimensi tersebut mencakup jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminitas, penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka panjang versus jangka pendek, dan *indulgence versus restraint*. Pemahaman tentang dimensi-dimensi tersebut sangat penting dalam konteks komunikasi antarbudaya, khususnya bagi imigran yang berusaha beradaptasi dengan budaya baru (Hofstede, 1980).

Dimensi pertama, jarak kekuasaan, mengacu pada sejauh mana anggota masyarakat menerima dan mengharapkan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi, hierarki dan otoritas lebih diterima, sehingga individu cenderung tidak mempertanyakan keputusan yang diambil oleh pemimpin atau otoritas. Sebaliknya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang rendah, terdapat harapan untuk kesetaraan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam konteks imigran Afghanistan yang beradaptasi di Indonesia, pemahaman tentang jarak kekuasaan dapat membantu mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal dan memahami dinamika sosial yang ada.

Dimensi kedua, individualisme versus kolektivisme, menggambarkan sejauh mana individu lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Dalam budaya individualis, individu cenderung lebih mandiri serta menekankan pencapaian pribadi, sedangkan dalam budaya kolektivis, hubungan sosial dan tanggung jawab terhadap kelompok lebih diutamakan. Penelitian menunjukkan bahwa imigran dari budaya kolektivis mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya individualis, di mana norma-norma sosial dan interaksi lebih bersifat kompetitif. Dalam konteks Afghanistan yang memiliki latar belakang budaya kolektivis, mereka menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang

individualis, khususnya dalam hal membangun jaringan sosial dan dukungan.

Dimensi ketiga, maskulinitas versus feminitas, berhubungan dengan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Budaya maskulin cenderung menekankan keberhasilan, kompetisi, dan pencapaian, sedangkan budaya feminin lebih menekankan pada hubungan, kerjasama, serta kesejahteraan. Dalam konteks adaptasi budaya, imigran yang berasal dari budaya maskulin merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi dalam hal pencapaian, sedangkan mereka yang berasal dari budaya feminin lebih berfokus pada membangun hubungan sosial yang harmonis. Pemahaman tentang dimensi tersebut dapat membantu imigran Afghanistan dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial di Indonesia yang memiliki kombinasi nilai maskulin dan feminin.

Dimensi keempat, penghindaran ketidakpastian, mengacu pada sejauh mana individu dalam suatu budaya merasa nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang tinggi cenderung memiliki aturan dan prosedur yang ketat untuk mengurangi ketidakpastian, sedangkan budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Imigran Afghanistan, yang seringkali menghadapi situasi yang tidak pasti dan tidak terduga dalam proses adaptasi mereka, perlu memahami bagaimana masyarakat setempat mengelola ketidakpastian. Hal tersebut dapat membantu mereka menyesuaikan harapan dan strategi mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat baru.

Dimensi kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek, menggambarkan sejauh mana budaya menekankan nilai-nilai jangka panjang, seperti ketekunan serta penghematan, dibandingkan dengan nilai-nilai jangka pendek, seperti pemenuhan kebutuhan saat ini dan tradisi. Budaya dengan orientasi jangka panjang cenderung lebih fokus pada perencanaan masa depan dan investasi dalam hubungan jangka panjang, sedangkan budaya dengan orientasi jangka pendek lebih menekankan pada hasil instan. Dalam konteks

imigran Afghanistan, pemahaman tentang orientasi jangka panjang dapat membantu mereka dalam merencanakan masa depan mereka di Indonesia, seperti dalam hal pendidikan dan pekerjaan.

Dimensi terakhir, *indulgence versus restraint*, berhubungan dengan sejauh mana individu dalam suatu budaya merasa bebas untuk mengejar kesenangan dan kepuasan pribadi. Budaya *indulgent* cenderung lebih terbuka terhadap ekspresi emosi dan pencarian kesenangan, sedangkan budaya *restraint* lebih menekankan kontrol diri dan pengendalian emosi. Dalam konteks adaptasi budaya, imigran Afghanistan perlu menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berbeda terkait dengan ekspresi emosi dan perilaku sosial. Memahami dimensi tersebut dapat membantu mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat dan membangun hubungan yang lebih baik.

Selain itu, sejumlah penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa dimensi budaya Hofstede memiliki implikasi langsung terhadap proses adaptasi imigran di berbagai negara. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanovic et al. (2020) menemukan bahwa kesenjangan nilai budaya antara negara asal dan negara tujuan berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres dalam akulturasi, khususnya pada kelompok pengungsi yang mengalami perubahan budaya secara drastis dalam waktu singkat. Sementara itu, penelitian Kutor et al. (2021) menegaskan bahwa imigran dari budaya kolektivis cenderung menghadapi tantangan lebih besar ketika beradaptasi dengan budaya yang lebih individualis, khususnya dalam hal pola komunikasi, pengambilan keputusan, dan harapan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Temuan tersebut menguatkan bahwa perbedaan nilai budaya bukan hanya bersifat teoretis, tetapi berdampak langsung pada pengalaman komunikasi dan integrasi sosial imigran di lingkungan baru. Dengan demikian, kerangka Hofstede bukan hanya membantu memetakan perbedaan budaya, tetapi juga menjadi alat penting untuk memahami bagaimana imigran menavigasi hubungan sosial, mengelola tekanan akulturasi, serta membangun strategi adaptasi yang sesuai dengan konteks masyarakat penerima.

Secara keseluruhan, dimensi budaya Hofstede memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami perbedaan budaya serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial (Hofstede, 1980). Dalam konteks imigran Afghanistan yang beradaptasi di Indonesia, pemahaman tentang dimensi-dimensi tersebut dapat membantu mereka menavigasi tantangan yang mereka hadapi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat setempat. Dengan memahami nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berbeda, imigran dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk beradaptasi serta berintegrasi ke dalam masyarakat baru mereka (Cormos, 2022).

2.2.4 Jenis-Jenis Migran

Migrasi sebagai fenomena sosial telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia, di mana individu maupun kelompok berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena berbagai alasan, baik sukarela maupun terpaksa. Dalam kajian komunikasi antarbudaya, Martin dan Nakayama (2018) mengelompokkan jenis-jenis migran berdasarkan sejumlah dimensi, termasuk alasan migrasi, durasi tinggal, tingkat keterlibatan budaya, serta status legal dan politik mereka. Klasifikasi tersebut penting untuk memahami bagaimana pengalaman serta tantangan yang dihadapi oleh para migran berbeda satu sama lain, khususnya dalam konteks komunikasi dan adaptasi budaya di lingkungan baru.

Secara umum, Martin dan Nakayama membedakan dua kategori besar migran, yaitu migran sukarela (*voluntary migrants*) dan migran tidak sukarela (*involuntary migrants*). Migran sukarela mencakup mereka yang berpindah karena alasan ekonomi, pendidikan, atau gaya hidup, serta umumnya memiliki waktu dan sumber daya untuk merencanakan perpindahan tersebut. Contohnya adalah imigran kerja, mahasiswa rantau, dan ekspariat profesional. Mereka cenderung memiliki pilihan yang relatif lebih besar dalam hal tempat tinggal,

pekerjaan, serta mobilitas sosial. Sementara itu, migran tidak sukarela adalah mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat tekanan politik, konflik, kekerasan, bencana alam, atau pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok tersebut mencakup pengungsi, pencari suaka, dan korban perdagangan manusia. Mengingat keberangkatan mereka didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup, bukan pilihan bebas, mereka kerap menghadapi kendala struktural yang lebih kompleks, baik secara legal, sosial, maupun psikologis (Martin & Nakayama, 2018)

Di antara jenis migran sukarela, terdapat subkategori yang dikenal sebagai imigran jangka panjang (*long-term immigrants*) dan *sojourners*. Imigran jangka panjang adalah mereka yang berniat tinggal secara permanen di negara tujuan. Mereka seringkali datang bersama keluarga dan berupaya menjadi bagian dari masyarakat setempat, seperti belajar bahasa lokal serta menyesuaikan diri dengan norma budaya setempat. Dalam konteks tersebut, proses asimilasi dan akulterasi menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana mereka membangun identitas baru di lingkungan baru. Sementara itu, *sojourners* merupakan individu yang bermigrasi untuk jangka waktu tertentu dengan niat kembali ke negara asal. Contoh paling umum dari *sojourners* adalah mahasiswa internasional, pekerja kontrak, dan tenaga kerja temporer. Mengingat waktu tinggal mereka terbatas, tingkat keterlibatan dalam budaya setempat cenderung lebih rendah, dan strategi adaptasi mereka lebih bersifat fungsional daripada transformasional (Martin & Nakayama, 2018).

Jenis migran berikutnya yang dikaji oleh Martin dan Nakayama adalah pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*), yang termasuk dalam kategori migran tidak sukarela. Kedua kelompok tersebut mengalami perpindahan karena faktor eksternal seperti perang, genosida, persekusi politik, atau bencana lingkungan. Namun, secara hukum internasional, pengungsi merupakan individu yang telah diakui statusnya oleh lembaga berwenang (seperti UNHCR), sedangkan pencari suaka masih berada dalam proses pengajuan perlindungan dan belum memiliki status legal tetap. Dalam konteks

tersebut, status legal menjadi faktor penting dalam menentukan akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Pengalaman traumatis yang menyertai perpindahan mereka juga menimbulkan tantangan psikososial tersendiri dalam proses integrasi, di mana komunikasi antarbudaya memainkan peran penting dalam membangun rasa aman dan penerimaan dalam masyarakat baru (Martin & Nakayama, 2018).

Jenis migran lainnya adalah diaspora migrants, yakni individu atau kelompok yang memiliki sejarah perpindahan kolektif dari tanah air mereka akibat penindasan, kolonialisme, atau ketidakstabilan politik. Mereka sering mempertahankan ikatan emosional dan budaya yang kuat dengan tanah asalnya, sekaligus membentuk identitas diaspora di negara tempat tinggal baru. Masyarakat diaspora tersebut umumnya memiliki jaringan sosial yang kuat, dan terkadang menciptakan *enclave* budaya yang relatif terisolasi dari masyarakat dominan. Walaupun demikian, mereka juga dapat menjadi agen perubahan dan jembatan budaya antara negara asal dan negara penerima. Dalam kajian diaspora, konsep identitas hibrida menjadi penting untuk memahami bagaimana pengalaman migrasi membentuk ulang cara individu memandang diri mereka sendiri dan budaya tempat tinggal baru (Martin & Nakayama, 2018).

Selain itu, migran internal (*internal migrants*) juga termasuk dalam pembahasan migrasi kontemporer. Migran internal adalah mereka yang berpindah tempat tinggal di dalam wilayah negara yang sama, umumnya dari desa ke kota, atau dari daerah konflik ke wilayah yang lebih aman. Walaupun tidak melintasi batas negara, mereka tetap menghadapi tantangan budaya dan ekonomi, khususnya ketika harus menyesuaikan diri dengan lingkungan perkotaan atau etnis yang berbeda. Meskipun kelompok tersebut tidak dibahas secara mendalam dalam ranah hukum internasional, migran internal dapat mengalami pengalaman komunikasi antarbudaya yang serupa dengan migran lintas negara, khususnya dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia (Martin & Nakayama, 2018).

Klasifikasi jenis-jenis migran tersebut penting dalam kerangka komunikasi antarbudaya karena pengalaman migrasi sangat mempengaruhi proses adaptasi dan interaksi individu dengan masyarakat penerima. Setiap jenis migran membawa latar belakang, harapan, dan strategi yang berbeda dalam menghadapi lingkungan sosial baru. Sebagai contoh, pengungsi Afghanistan yang tinggal di Indonesia memiliki tantangan adaptasi yang sangat berbeda dibandingkan mahasiswa internasional yang belajar di universitas di Indonesia, khususnya yang berasal dari negara yang tidak mengalami konflik. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap jenis-jenis migran menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan integrasi, layanan pendampingan sosial, serta program komunikasi lintas budaya yang efektif.

Secara keseluruhan, pembagian jenis-jenis migran sebagaimana dijelaskan oleh Martin dan Nakayama memberikan pemahaman konseptual yang kuat mengenai keragaman pengalaman migrasi. Dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah urban seperti Gading Serpong yang menjadi tempat tinggal masyarakat pengungsi dari berbagai negara, khususnya Afghanistan, klasifikasi tersebut membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap kelompok. Hal tersebut penting untuk merancang intervensi sosial yang lebih inklusif dan tepat sasaran, sekaligus mendorong pemahaman lintas budaya yang lebih mendalam di tengah masyarakat multietnis yang terus berkembang.

2.2.5 Migran dan Hubungan dengan *Host*

Hubungan antara migran dan masyarakat tuan rumah (*host*) merupakan aspek krusial dalam kajian migrasi yang memengaruhi proses integrasi sosial, adaptasi budaya, serta kesejahteraan psikososial migran. Interaksi tersebut bersifat dinamis dan kompleks, serta dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, serta personal yang berinteraksi dalam konteks sosial yang terus berubah. Menurut penelitian dalam bidang komunikasi antarbudaya dan sosiologi migrasi, hubungan antara migran dan *host society* tidak hanya soal

keberadaan fisik migran di wilayah baru, melainkan juga soal pembentukan jaringan sosial, negosiasi identitas, dan konstruksi makna bersama dalam tatanan sosial yang baru (Samovar et al., 2013).

Migran dalam konteks tersebut tidak sekadar individu yang berpindah geografis, tetapi juga faktor sosial yang membawa modal budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Interaksi mereka dengan masyarakat *host* memicu proses negosiasi budaya yang berpotensi menghasilkan akulturasi, integrasi, segregasi, atau marginalisasi. Strategi yang dipilih dari empat strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap *host society*, kebijakan pemerintah, serta kesiapan migran itu sendiri untuk menyesuaikan diri.

Salah satu tantangan utama dalam hubungan migran dengan *host* adalah stereotip dan prasangka yang dimiliki oleh masyarakat tuan rumah terhadap migran. Stereotip tersebut seringkali bersifat simplistik dan negatif, yang dapat memicu diskriminasi serta eksklusi sosial. Kajian komunikasi antarbudaya menggarisbawahi bahwa prasangka dan stereotip dapat memperkuat jarak sosial, menghambat komunikasi efektif, dan menimbulkan ketidakpercayaan (Samovar et al., 2013). Stigma sosial dan diskriminasi yang dialami memperparah kesulitan integrasi migran, karena masyarakat *host* terkadang memandang mereka sebagai “masyarakat lain” yang berpotensi mengancam stabilitas sosial dan ekonomi.

Hubungan interpersonal yang positif antara migran dan *host* dapat mempercepat proses integrasi serta meningkatkan kesejahteraan psikologis migran. Interaksi sosial yang sehat memungkinkan pembentukan jejaring sosial, yang tidak hanya menyediakan dukungan emosional dan material, tetapi juga menjadi media pembelajaran norma budaya serta bahasa setempat. Samovar et al. (2013) menekankan pentingnya keterampilan komunikasi antarbudaya dalam membangun hubungan tersebut, seperti kemampuan mendengarkan aktif, sensitivitas budaya, dan fleksibilitas beradaptasi dengan norma baru. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran simbolik yang lebih efektif serta

pengurangan kesalahpahaman yang sering muncul dalam konteks perbedaan budaya.

Kebijakan pemerintah serta sikap institusional juga sangat menentukan kualitas hubungan migran dan masyarakat *host*. Negara-negara dengan kebijakan terbuka dan inklusif cenderung menyediakan akses yang lebih baik bagi migran dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sehingga membuka peluang interaksi yang lebih luas serta harmonis. Sebaliknya, kebijakan yang restriktif atau diskriminatif dapat memperkuat segregasi dan marginalisasi, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak, di mana migran menjadi terpinggirkan, sedangkan masyarakat *host* kehilangan potensi kontribusi sosial-ekonomi dari migran.

Selain aspek struktural dan institusional, dimensi emosional serta identitas juga sangat mempengaruhi hubungan migran dengan *host*. Migran yang mampu mempertahankan identitas budaya asal sekaligus menerima identitas baru cenderung mengalami proses integrasi yang lebih sehat secara psikologis. Proses tersebut seringkali melibatkan negosiasi identitas yang berkelanjutan, di mana migran belajar menyeimbangkan rasa *belonging* kepada masyarakat asal dan masyarakat baru. Konflik identitas dapat muncul ketika tekanan asimilasi terlalu besar atau ketika migran menghadapi diskriminasi yang menghambat penerimaan oleh masyarakat *host*.

Interaksi migran dengan masyarakat *host* juga dapat menciptakan ruang dialog budaya yang produktif, di mana kedua pihak belajar dari perbedaan dan menemukan kesamaan yang dapat memperkuat kohesi sosial. Konsep dialog antarbudaya yang dikemukakan oleh Samovar et al. (2013) menekankan bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan sikap terbuka, kesediaan untuk mendengar perspektif lain, dan kemampuan untuk menghormati perbedaan. Melalui dialog tersebut, stereotip dapat dilunakkan, prasangka dapat dikurangi, serta hubungan sosial dapat dibangun atas dasar saling pengertian dan rasa hormat.

Namun, realita hubungan migran dengan *host* seringkali sarat dengan ketegangan dan konflik, yang muncul dari perbedaan nilai, kompetisi sumber daya, serta ketidaksetaraan sosial. Konflik tersebut dapat bersifat terbuka seperti diskriminasi langsung dan kekerasan, ataupun terselubung seperti diskriminasi sistemik yang membatasi akses migran terhadap layanan publik. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan mekanisme resolusi konflik yang inklusif dan berbasis dialog lintas budaya, agar ketegangan tersebut dapat dikelola secara konstruktif serta tidak mengarah pada polarisasi sosial (Samovar et al., 2013).

Dalam konteks migrasi yang terus meningkat secara global, hubungan migran dan *host* menjadi fokus utama kebijakan sosial serta program pembangunan masyarakat. Keberhasilan integrasi migran sangat bergantung pada kualitas interaksi sosial dan dukungan masyarakat yang diterima. Keterlibatan migran dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat *host* membuka peluang partisipasi penuh mereka sebagai warga negara atau penduduk yang produktif dan berdaya. Sebaliknya, eksklusi sosial memicu ketidakpuasan dan isolasi yang merugikan kesehatan mental serta stabilitas sosial.

Secara keseluruhan, hubungan antara migran dan masyarakat host bersifat dinamis, sehingga membutuhkan perhatian multidimensional, mulai dari aspek komunikasi antarbudaya, kebijakan publik, hingga praktik sosial sehari-hari. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut sangat penting untuk merancang program integrasi yang efektif serta membangun masyarakat multikultural yang inklusif dan harmonis. Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi antarbudaya yang mengedepankan kesadaran budaya, empati, dan dialog terbuka sangat dibutuhkan agar hubungan antara migran dan host dapat berkembang positif serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2.2.6 Culture Shock

Culture shock atau gegar budaya merupakan konsep penting dalam kajian komunikasi antarbudaya yang menggambarkan respons emosional, kognitif, dan perilaku seseorang ketika memasuki lingkungan budaya yang berbeda secara signifikan dari budaya asalnya. Konsep tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Oberg yang menggambarkan *culture shock* sebagai pengalaman disorientasi karena kehilangan tanda dan simbol sosial yang akrab dalam kehidupan sehari-hari (Nguyen, 2024). Menurut Efremov (2025), individu yang berpindah ke budaya baru akan mengalami tekanan psikologis akibat perbedaan bahasa, norma sosial, nilai budaya, maupun pola interaksi masyarakat setempat. *Culture shock* bukanlah reaksi yang bersifat patologis, tetapi respons alami manusia ketika menghadapi sistem makna dan realitas sosial baru yang belum dikenalnya. Dalam konteks migrasi, fenomena tersebut menjadi semakin kompleks karena imigran seringkali datang bukan hanya untuk bepergian sementara, tetapi untuk bertahan hidup di tengah kondisi penuh ketidakpastian.

Samovar et al. (2013) menjelaskan bahwa *culture shock* berhubungan erat dengan proses akulturasi, yaitu penyesuaian terhadap budaya baru yang melibatkan perubahan identitas, perilaku, dan pola komunikasi. Pengalaman *culture shock* sering muncul ketika individu menyadari bahwa aturan komunikasi yang dianggap normal di budaya asal ternyata memiliki makna berbeda di lingkungan baru. Sebagai contoh, penggunaan bahasa tubuh, intensitas kontak mata, ekspresi emosi, hingga gaya humor dapat menjadi sumber kesalahpahaman dalam interaksi antarbudaya. Pada fase awal, individu umumnya merasakan kebingungan, kecemasan, dan frustrasi ketika menghadapi ketidaksesuaian tersebut. Reaksi emosional tersebut terjadi karena individu belum memiliki kompetensi budaya yang memadai untuk menafsirkan simbol-simbol sosial di lingkungan baru.

Berdasarkan teori kurva-U yang dikemukakan oleh Lysgaard, *culture shock* umumnya muncul setelah fase *honeymoon*, yaitu fase ketika individu masih merasakan kegembiraan dan rasa penasaran terhadap budaya baru

(Nolan, 2024). Pada tahap berikutnya, muncul perasaan jemu dan tertekan akibat perbedaan nilai, keterbatasan bahasa, serta minimnya dukungan sosial. Lysgaard menekankan bahwa *culture shock* bukan hanya persoalan kegagalan komunikasi, tetapi juga persoalan identitas, karena individu harus menyesuaikan struktur makna yang sudah tertanam sejak kecil dengan realitas baru yang berbeda. Ketika perbedaan budaya semakin terasa, persoalan seperti *homesickness*, perasaan terasing, serta ketidakpastian menjadi lebih dominan, khususnya pada imigran dan pencari suaka yang seringkali kehilangan sistem dukungan keluarga dan komunitas.

Ward et al. (2020) menekankan bahwa *culture shock* selalu bersifat multidimensional, yang mencakup aspek psikologis, sosiokultural, dan komunikasi. Dari sisi psikologis, individu menghadapi stres, kecemasan, dan depresi ringan akibat perubahan lingkungan. Dari sisi sosiokultural, individu kesulitan menjalankan fungsi sehari-hari seperti memahami birokrasi, berinteraksi dengan masyarakat, atau mematuhi norma sosial tertentu. Sedangkan dari sisi komunikasi, individu harus menghadapi hambatan bahasa yang mengganggu kemampuan mereka mengekspresikan diri dan memahami pesan dari orang lain. Hambatan-hambatan tersebut dapat membatasi kemampuan individu membangun hubungan sosial, yang pada akhirnya memperpanjang durasi *culture shock*.

Dalam konteks imigran, *culture shock* seringkali diperparah oleh pengalaman traumatis sebelum migrasi. Hasanovic et al. (2020) menjelaskan bahwa pengalaman kehilangan, konflik, dan pemaksaan migrasi dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap stres dalam akulturasi, termasuk *culture shock*. Pengungsi umumnya menghadapi kondisi isolasi sosial yang lebih ekstrem dibandingkan migran sukarela, karena mereka tidak memiliki akses memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, atau komunitas pendukung. Tanpa dukungan sosial, individu lebih rentan mengalami keterkejutan budaya yang berkelanjutan, yang dapat menghambat proses integrasi. Bagi pengungsi Afghanistan, perbedaan nilai budaya seperti terkait agama, peran gender, atau

struktur keluarga juga dapat memicu kesalahpahaman ketika berinteraksi dengan masyarakat di negara penerima.

Ward et al. (2001) mengembangkan pendekatan dua dimensi yang menekankan bahwa *culture shock* tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga sosiokultural. Secara emosional, individu mengalami perubahan *mood*, rasa kehilangan, dan stres karena perubahan identitas. Secara sosiokultural, individu menghadapi kesulitan dalam menavigasi aturan sosial, etiket komunikasi, dan pola perilaku masyarakat setempat. Menurut mereka, kemampuan individu mengatasi *culture shock* sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kompetensi komunikasi, dukungan sosial, serta tingkat kesamaan budaya antara budaya asal dan budaya tujuan. Semakin besar kesenjangan budaya, semakin besar kemungkinan individu mengalami *culture shock* yang intens dan berkepanjangan.

Selain teori klasik, kajian modern tentang *culture shock* menekankan pentingnya perspektif lintas budaya yang lebih adaptif. Pacheco (2020) menunjukkan bahwa *culture shock* dapat menjadi tahap perkembangan identitas lintas budaya yang positif apabila individu menerima perbedaan sebagai bagian dari proses belajar. Dalam pandangan tersebut, *culture shock* bukan hanya pengalaman negatif, tetapi juga peluang untuk mengembangkan fleksibilitas kognitif, toleransi ambiguitas, serta keterampilan komunikasi lintas budaya. Semakin terbuka individu terhadap pengalaman baru, semakin cepat mereka dapat beradaptasi dan mencapai tahap penyesuaian stabil.

Namun pada kelompok rentan seperti imigran, pencari suaka, atau pengungsi, *culture shock* cenderung memiliki dampak yang lebih berat. Hal tersebut karena mereka tidak selalu memiliki kontrol atas proses migrasi, kondisi tempat tinggal, ataupun akses terhadap sumber daya. Ketiadaan dukungan sosial formal sering membuat mereka terekspos pada tekanan akulturasi yang tinggi. Dalam banyak kasus, pengungsi bahkan mengalami *culture shock* ganda, yaitu keterkejutan budaya karena lingkungan baru sekaligus *shock* emosional akibat trauma masa lalu. Kondisi tersebut disebut

sebagai *traumatic acculturative stress*, di mana tekanan akulturasi dan trauma masa lalu saling bersinggungan serta mempengaruhi kesehatan mental imigran (Lerias et al., 2025).

Terdapat model yang paling umum digunakan untuk menggambarkan proses penyesuaian individu di lingkungan budaya baru, yaitu Model Kurva U dan Model Kurva W. Kedua model tersebut memberikan kerangka yang membantu memahami dinamika emosional, psikologis, dan sosial yang dialami imigran atau pendatang ketika berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Model Kurva U pertama kali diperkenalkan oleh Lysgaard serta menggambarkan proses adaptasi budaya yang berlangsung dalam empat tahap, yaitu *honeymoon*, *crisis*, *recovery*, dan *adjustment* (Benung et al., 2025). Pada tahap *honeymoon*, individu umumnya merasa antusias, penasaran, dan kagum terhadap budaya baru yang dianggap menarik serta berbeda dari budaya asalnya. Namun, antusiasme tersebut umumnya tidak bertahan lama, karena individu akan memasuki tahap *crisis* atau masa gegar budaya, yakni ketika mereka mulai menyadari adanya perbedaan bahasa, nilai, norma sosial, hingga gaya komunikasi yang sulit dipahami. Krisis tersebut umumnya ditandai dengan munculnya kecemasan, frustrasi, kebingungan, hingga *homesickness*. Selanjutnya, individu memasuki tahap *recovery*, di mana mereka mulai mengembangkan pemahaman terhadap lingkungan baru melalui proses belajar, observasi, dan adaptasi. Pada akhirnya, tahap *adjustment* terjadi ketika individu telah mampu berfungsi secara efektif dalam budaya baru, memahami aturan sosial, serta membentuk hubungan sosial yang lebih stabil (Kim, 2001). Model Kurva U sering digunakan dalam penelitian tentang mahasiswa internasional, pekerja asing, dan imigran yang mengalami perubahan budaya secara signifikan.

Sementara itu, Model Kurva W dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses adaptasi budaya yang tidak hanya terjadi saat memasuki budaya baru, tetapi juga ketika kembali ke budaya asal. Model ini dipopulerkan oleh Gullahorn dan Gullahorn, serta

disebut Kurva W karena pola emosional yang dialami individu berbentuk dua cekungan, yakni saat masuk ke budaya baru dan saat kembali ke budaya asal (Wattanacharoensil et al., 2020). Pada tahap awal, individu mengalami proses adaptasi yang mirip dengan model Kurva U, yaitu *honeymoon*, *crisis*, *recovery*, dan *adjustment*. Namun, yang membedakan model tersebut adalah adanya tahap tambahan yakni *re-entry shock* atau gegar budaya balik. Ketika individu kembali ke budaya asal, mereka sering merasa asing atau tidak sepenuhnya cocok lagi dengan norma-norma yang pernah mereka kenal. Hal tersebut terjadi karena selama berada di budaya baru, mereka telah mengalami perubahan identitas, nilai, dan pola pikir yang membuat budaya asal tampak berbeda atau bahkan membatasi. *Re-entry shock* dapat menimbulkan stres yang sama besarnya dengan *culture shock* awal dan membutuhkan proses penyesuaian ulang yang tidak selalu mudah (Knell, 2012).

Secara keseluruhan, *culture shock* merupakan proses yang tidak dapat dihindari dalam setiap bentuk migrasi. Fenomena tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan budaya, tetapi juga oleh interaksi antara faktor psikologis, komunikasi, dan struktur sosial. Bagi imigran, khususnya mereka yang berpindah karena konflik atau paksaan, pemahaman tentang *culture shock* menjadi penting untuk mengembangkan strategi adaptasi yang efektif. Dukungan sosial, peningkatan kompetensi komunikasi antarbudaya, serta pemahaman mendalam terhadap nilai budaya masyarakat tujuan menjadi faktor yang dapat membantu mempercepat proses penyesuaian. Dengan demikian, kajian mengenai *culture shock* memberikan landasan teoretis yang penting untuk memahami tantangan yang dihadapi imigran dan relevan dengan upaya menciptakan interaksi antarbudaya yang lebih harmonis serta inklusif di masyarakat multicultural.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 1 Gambar Kerangka Pemikiran

